

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar (BKPMPT) berdirinya berdasarkan PERDA Nomor 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Sebelum berdirinya Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar (BKPMPT) ini adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar (BP2T) dibentuk berdasarkan pada Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Dengan berkembangnya keorganisasian maka yang dulu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar. Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai pedoman operasional dalam melaksanakan pembangunan daerah sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BKPMPT) Kabupaten Banjar. Renstra yang disusun berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun (2016-2021). Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, dan rencana kinerja 5 tahunan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pada dasarnya LKJIP BKPMPT Tahun 2016 mengkomunikasikan pencapaian kinerja kegiatan selama Tahun 2016. Adapun capaian kinerja (performance results) tersebut, dibandingkan dengan rencana kinerja (performance plan) dan sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Sedangkan analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir tersebut di atas, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKJIP adalah mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP BKPMPT Kabupaten Banjar tahun 2016 sebagai sarana pertanggungjawaban atas capaian kinerja yang diperoleh selama Tahun 2016. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Tujuan dan sasaran strategis dapat dicapai.
2. Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP BKPMPT Kabupaten Banjar tahun 2016 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh Pimpinan.
3. Diharapkan sebagai salah satu upaya bagi untuk perbaikan di masa mendatang dan dijadikan salah satu dasar bagi pengambilan keputusan dalam melakukan perbaikan terhadap pencapaian Visi dan Misi.

C. Data Umum Organisasi

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 tanggal 12 November 2012 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

1. Kedudukan

Kedudukan Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar adalah sebagai salah satu unsur pembantu Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Banjar dibidang Pelayanan Perizinan dan investasi, yang meliputi Penanaman Modal, Promosi kerjasama dan informasi dan Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu yang bertanggung jawab kepada Bupati Banjar melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok

Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Penanaman Modal dan Pelayananan Perizinan yang meliputi Pembinaan Penanaman Modal, Kerjasama dan Informasi, Pelayanan Perizinan Jasa Usaha, dan Pelayananan Perizinan Tertentu.

3. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok diatas, Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- b. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan pengendalian kegiatan Bidang Penanaman Modal;
- c. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi;
- d. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu;
- e. Pembinaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu ;
- f. Pemberian Pelayanan Umum dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan ;
- g. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan ;
- h. Pembinaan Terhadap Unit Pelaksana Teknis ;
- i. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar tanggal 12 November 2012 maka struktur organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - Sub Bagian Program
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Bidang Penanaman Modal
 - Sub Bidang Perencanaan Investasi
 - Sub Bidang Pengawasan Dan Pengendalian

- c. Bidang Promosi Kerjasama Dan Informasi
 - Sub Bidang Promosi dan Kerjasama
 - Sub Bidang Informasi dan Pengaduan
- d. Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha
 - Tim Teknis
- e. Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu
 - Tim Teknis
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut Struktur Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Banjar menurut Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 .

STRUKTUR ORGANISASI

Selanjutnya tugas pokok dari masing-masing susunan organisasi diatas diuraikan lagi dengan Peraturan Bupati Kota Banjar Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar.

Untuk mengukur pencapaian kinerja sasaran dan kegiatan tersebut setiap tahun diadakan pengukuran kinerja yang tertuang dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIIP). Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKJIIP ini merupakan tuntutan bagi bagi BKPMPPPT Kab. Banjar selaku Intansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan kinerja yang dilakukan selama 1 tahun dalam mewujudkan tujuan dibentuknya organisasi. Siklus LKJIIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan Tujuan, dan Sasaran Strategis dan selanjutnya setiap tahunnya ditetapkan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan tujuan dan sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana keberhasilan pencapaian kinerja BKPMPPPT Kab.Banjar. Pada setiap akhir periode pelaksanaan kegiatan, capaian kinerja dari setiap kegiatan dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud LKJIIP.

Berdasarkan hal tersebut maka ditetapkan tolok ukur keberhasilan BKPMPPPT Kab. Banjar dengan indikator kinerja utama yaitu persentase capaian penerimaan pendapatan daerah dengan mengacu pada capaian tahun sebelumnya serta merencanakan capaian utnuk tahun-tahun yang akan datang seperti tertuang pada tabel sasaran strategis jangka menengah di bawah ini :

TABEL 1 SASARAN STRATEGIS JANGKA MENENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN (Tahun Ke-)				
				1	2	3	4	5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan investasi dan kerjasama swasta dan antar daerah	Meningkatnya investasi daerah	persentasi pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)	82,5	84	85	87	88
2	Meningkatkan kinerja pelayanan publik di bidang administrasi	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntabel	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti	100	100	100	100	100
3	meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm yang prima	meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan	81,5	81,7	81,9	82	82,1

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan bahwa yang menjadi indikator kinerja utama yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Banjar adalah persentasi pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA) target ditahun 2016 sebesar 82,5%, Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti dengan target 2016 sebesar 100% dan Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan dengan target sebesar 81,5% ditahun 2016 ini. Yang setiap indikatornya mempunyai tujuan meningkatkan investasi dan kerjasama swasta dan antar daerah, meningkatkan kinerja pelayanan publik dibidang administrasi dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan perizinan yaitu nilai IKM yang prima.

D. Aspek Stratejik Organisasi

BKPMPT Kabupaten Banjar bertugas melaksanakan sebagian urusan otonomi daerah sebagai gambaran apa yang diinginkan 5 (lima) tahun kedepan, sesuai dengan visi misi Kabupaten Banjar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 - 2021 adalah

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Banjar Yang Sejahtera dan Barokah"

Yang dijabarkan sebagaimana berikut :

- Sejahtera dalam kesejahteraan rakyat yang mengandung keterpaduan dimensi material dan spiritual dalam wujud suasana kehidupan yang aman dan damai
- Barokah adalah sesuatu yang dirasakan mempunyai nilai tambah, memberi manfaat dan kemaslahatan bagi orang banyak.

Dalam upaya mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banjar 2016-2021, misi pembangunan dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengamalan ajaran agama dan suasana kehidupan beragama;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang berbasis pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan dan kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan komoditas unggulan daerah lainnya dengan pendekatan Agribisnis dan industri berwawasan lingkungan secara berkelanjutan;

4. Mewujudkan pemerataan dan keseimbangan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing ekonomi daerah;
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih Dan Amanah.

Dengan penjelasan misi yaitu :

Misi 1

Mewujudkan kondisi masyarakat yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama berbasis keilmuan sehingga terjaga nuansa keindahan kehidupan beragama, ketertiban di lingkungan masyarakat, terpelihara kerukunan dan toleransi antar umat beragama serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Misi 2

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan indikasi adanya peningkatan mutu pendidikan terhadap siswa sekolah umum dan agama, meningkatnya minat baca masyarakat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kualitas ketenagakerjaan serta perlindungan sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).

Misi 3

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan indikasi adanya pertumbuhan ekonomi khususnya PDRB sektor pertanian umum, sektor perikanan, mantapnya kondisi ketahanan pangan daerah yang disertai peningkatan pendapatan, produksi dan produktifitas, peningkatan nilai tambah, daya saing produk unggulan daerah, pengembangan industri hilir, agroindustri, kebijakan (regulasi) yang tepat dengan tetap memperhatikan kelestarian sumber daya alam yang berkelanjutan serta prinsip tata kelola lingkungan yang baik.

Misi 4

Mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan yang berkeadilan dan menyelenggarakan pembangunan pada segala aspek dan sendi kehidupan yang hasilnya dapat dirasakan secara merata, seimbang dan proporsional oleh seluruh lapisan masyarakat dan antar wilayah dengan mengurangi kesenjangan social secara menyeluruh. Keberpihakan kepada masyarakat dan wilayah yang tertinggal, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan akses yang sama

terhadap pelayanan sosial dan sarana prasarana ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek.

Misi 5

Meningkatkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel, pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan berorientasi publik, kondisi keamanan dan politik yang kondusif serta pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan prima secara terpadu.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Perjanjian Kinerja tahun 2016 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional BKPMPT Kabupaten Banjar sepenuhnya dapat dirujuk pada Perjanjian Kinerja tahun 2016.

Untuk mewujudkan target kinerja seperti yang sudah direncanakan selanjutnya dilakukan penetapan kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara Bupati Banjar dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar untuk mewujudkan target kinerja berdasarkan sumber daya yang dimiliki dan ketersediaan dari dokumen RAPBD Kabupaten Banjar tahun 2016. Penetapan Kinerja Tahun 2016 BKPMPT Kabupaten Banjar.

Dokumen Perjanjian Kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan instansi pemerintah untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian realisasi kinerja dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta menilai keberhasilan organisasi. Dokumen Perjanjian Kinerja mencantumkan sasaran strategis, indikator kinerja organisasi, beserta target kinerja dan anggaran program seperti tabel 2.1 halaman berikut:

Tabel 2.1 perjanjian kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016
1	Meningkatnya investasi daerah	persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)	82,5
2	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntable	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti	100

3	meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan	81,5
---	--	--	------

Program	Anggaran 2016
1. Peningkatan administrasi perkantoran	Rp. 1.855.351.360
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 434.450.000
3. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 235.100.000
4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 23.300.000
5. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Rp. 419.620.000
6. Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rp. 871.432.520
7. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 166.080.000
8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Rp. 208.115.120
9. Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	RP. 94.360.000
10. Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	Rp. 172.600.000

Berdasarkan tabel 2.2 diatas maka dapat ditetapkan sarana strategis, indikator kinerja utama beserta targetnya serta program beserta anggaran yang menjadi prioritas capaian kinerja BKPMPT. Data tersebut tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016
1	Meningkatnya investasi daerah	persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)	82,5
2	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang efisien, efektif, dan akuntable	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti	100
3	meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan	81,5

Berdasarkan tabel diatas untuk dapat diketahui Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup; kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

1. Kinerja Kegiatan

Untuk mengukur kinerja yang obyektif, akurat dan terpercaya berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing kegiatan, dimana untuk pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus:

1) Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian Rencana} \\ \text{Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Rencana Tingkat} \\ \text{Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Kinerja Sasaran.

Untuk mengukur kinerja sasaran pengukuran kinerjanya dilakukan dengan memperhatikan kondisi masing-masing capaian kegiatan, menggunakan rumus :

1. Jika semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Rencana} \\ \text{Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, untuk kondisi demikian digunakan rumus :

$$\begin{array}{l} \text{Persentase} \\ \text{Pencapaian} \\ \text{Rencana} \\ \text{Tingkat Capaian} \end{array} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Realisasi}-\text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan perbandingan capaian kinerja sasaran strategis, antara target yang ditetapkan pada Rencana Kinerja Tahunan atau Penetapan Kinerja, dibandingkan dengan hasil realisasi semua kegiatan setelah dilaksanakan selama satu tahun berjalan. Pencapaian sasaran dinilai berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- 85 s/d 100 % = Sangat baik/sangat berhasil
- 70 - < 85 % = Baik/berhasil
- 55 - < 70 % = Cukup berhasil
- < 55 % = Tidak berhasil

Pengukuran pencapaian kinerja juga dapat dilakukan dengan menggunakan perbandingan capaian kinerja sasaran strategis, antara realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun yang lalu; membandingkan realisasi dengan capaian kinerja yang sama dengan daerah lain; membandingkan dengan ukuran standar nasional/ provinsi seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal).

Pada LKJIP tahun 2016 adalah dengan menggunakan realiasi tahun 2016 terhadap target tahun 2016, baik indikator kinerja sasaran program maupun kinerja kegiatan

Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (tidak tercapainya target) serta tindakan yang diperlukan dimasa mendatang.

Berdasarkan anggaran belanja langsung per sasaran strategis BKPMPT dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.4 Anggaran Belanja Langsung

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran 2016		
			TARGET	REALISASI	%REALISASI
1	Meningkatnya investasi daerah	persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)	Rp. 1.457.132.520	Rp. 1.435.672.438	98,52%
2	Terwujudnya pelayanan publik di bidang administrasi yang	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg	Rp. 94.360.000	Rp. 76.665.000	81,24%

	efisien, efektif, dan akuntabel	telah ditindaklanjuti			
3	meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pelayanan perizinan nilai ikm	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan	Rp. 380.715.120	Rp.355.090.829	93,26%
Jumlah :			Rp.1.932.207.640	Rp.1.867.428.267	96,64%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian realisasi anggaran BKPMPT untuk program utama sesuai DPA Tahun 2016 sudah mencapai 96,64% atau sebesar Rp. 1.867.428.267,- dari Rp. 1.932.207.640 yang dianggarkan di anggaran tahun 2016. Dari pagu diatas ada beberapa hasil kegiatan yang dihasilkan pada program utama yaitu :

Output :

Program Utama yang dilaksanakan untuk mencapai target sasaran yang telah di tetapkan tersebut serta telah dilaksanakan oleh BKPMPT Kab. Banjar sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

a. Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi

Dalam pelaksanaan kegiatan Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi, BKPMPT melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berinvestasi, BKPMPT juga melakukan rapat atau pertemuan rutin setiap bulan untuk mengevaluasi dan meningkatkan koordinasi selain itu cek lapangan juga rutin dilakukan bersama skpd terkait guna memonitoring dan mengontrol semua kelengkapan perizinan sesuai dengan regulasi yang ada. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah. Kelompok sasaran kegiatan ini adalah perusahaan daerah, perusahaan modal asing dan perusahaan modal dalam negeri yang beroperasi di Kabupaten Banjar.

b. Kegiatan Kajian Kebijakan Penanaman Modal

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mendorong penanaman modal baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, dengan melalui penyederhanaan prosedur investasi dan desentralisasi beberapa kewenangan penanaman modal.

Otonomi daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi daerah untuk mengembangkan dan memajukan daerah, baik melalui pengembangan komoditas dan potensi daerah yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Banjar berupaya terus menciptakan iklim investasi yang kondusif yang dapat mendukung kegiatan investasi di Kabupaten Banjar, seperti penyederhanaan prosedur investasi, transparansi dan kepastian hukum serta perbaikan sarana dan prasarana fasilitas penunjang investasi.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banjar untuk dapat mengidentifikasi potensi investasi melalui kegiatan identifikasi potensi investasi ke Kecamatan-kecamatan yang dianggap memiliki potensi investasi untuk dikembangkan.

Dalam pelaksanaan kegiatan, BKPM PPT Kab. Banjar melakukan expose dan monitoring setiap bulannya dan mendatangkan berbagai narasumber dari provinsi dan BKPM pusat, kegiatan tersebut dimaksud dapat memberikan informasi dan gambaran yang menyeluruh tentang potensi beberapa faktor strategis di Kabupaten Banjar serta peluang pengembangan investasinya. yang dapat dijadikan referensi baik bagi Pemerintah Daerah untuk memajukan dan mengembangkan potensi investasi/komoditas unggulan dan untuk para investor sebagai informasi awal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Banjar.

Selain itu BKPM PPT juga melaksanakan kegiatan lainnya seperti bimbingan teknis terkait bidang penanaman modal.

c. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal

Berbagai usaha dilakukan untuk meningkatkan pelayanan perizinan agar menarik para investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banjar salah satunya melakukan pencetakan brosur yang berguna untuk memudahkan para calon investor untuk mengetahui persyaratan yang ada, dengan cara meningkatkan Sumber daya manusia yang ada di BKPM PPT dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang ada. Selain itu kegiatan ini juga mengkoordinasikan semua bidang terkait dalam peningkatan pelayanan perizinan termasuk perjalanan dinas guna menambah wawasan para sumber daya manusia BKPM PPT.

d. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal

Dalam Kegiatan ini dibentuk tim penanaman modal yang terfokus pada pembuatan masterplan investasi yang bertujuan untuk meningkatkan nilai investasi dikabupaten Banjar. Dengan disusunnya Master Plan (cetak biru) ini para calon investor dapat mengetahui produk-produk unggulan sesuai daerah masing-masing karena didalam master plan investasi sudah termuat berbagai produk unggulan Kabupaten Banjar, dari pemetaan wilayah juga dapat diketahui produk unggulan di setiap Kecamatan sehingga memudahkan investor untuk memilih lokasi yang diinginkan, dengan disusunnya master plan investasi ini juga dapat mengetahui usaha yang sedang berkembang dan berjalan.

2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

a. Peningkatan Kegiatan Pemantauan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Dalam kegiatan ini BKPMPT membentuk tim pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal yang bertujuan untuk melakukan monitoring dan evaluasi sebagai upaya memonitor berbagai kegiatan investasi di Kabupaten Banjar. Hasil dari kegiatan tim tersebut ketataan investor dalam pentingnya izin dalam berinvestasi di Kabupaten Banjar meningkat, dengan adanya kegiatan ini para investor lebih mengerti tentang hak dan kewajibannya, dan investor dapat mengetahui peluang usaha dari hasil pembinaan dari tim yang telah dibentuk.

b. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi

Di Kegiatan ini diadakan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di BKPMPT Kab. Banjar, selain itu juga dapat menambah wawasan terutama dalam hal penanamam modal karena Bimbingan Teknis yang diikuti dipilih sesuai dengan bimbingan teknis yang diperlukan dan diharapkan kegiatan ini dapat dilakukan secara berkelanjutan.

c. Penyelenggaraan Pameran Investasi

Salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Banjar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Banjar adalah dengan menarik minat investor dari dalam dan luar negeri untuk membeli produk unggulan serta

berinvestasi di Kabupaten Banjar. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Banjar senantiasa mengikuti berbagai kegiatan pameran dengan skala lokal dan nasional bahkan internasional yang dapat menjadi sarana informasi dan promosi potensi sumber daya alam dan produk kreatifitas industri daerah yang difasilitasi melalui kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi.

Foto Pameran Investasi Di Surabaya



3. Program Peningkat dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

a. Kegiatan Intensifikasi dan Ektensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Di Kegiatan ini BKPMPPT Kab. Banjar membentuk tim Penerbitan Pengawasan media reklame dan Tim Pendataan Potensi Reklame serta bekerja sama dengan SKPD terkait guna melaksanakan pengawasan dan pengendalian reklame di Kabupaten Banjar dan juga kegiatan ini mengangkut konsultasi dan peningkatan

wawasan tentang intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Kegiatan ini juga merupakan salah satu penunjang Pendapatan Asli Daerah melalui retribusi reklame.

4. Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

a. Kegiatan Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat

Di dalam kegiatan ini dibentuk tim pelaksana penanganan pengaduan yang bertugas menyelesaikan semua bentuk pengaduan yang masuk di BKPMPT Kab. Banjar beserta dengan semua peralatan pendukungnya. Pengaduan yang masuk Ke BKPMPT berupa laporan melalui Pos Pengaduan yang telah tersedia.

Berikut mekanisme penanganan pengaduan masyarakat :

- Pengguna jasa menyampaikan pengaduan
- Petugas mengentry data pengaduan, memberikan resi ke pengguna jasa
- Menerima penyebab
- Menetapkan tindakan
- Memberikan informasi kepada pengguna jasa
- Melakukan tindakan dan verifikasi
- Pengguna jasa menyampaikan pernyataan puas/tidak puas

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

a. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Salah satu upaya peningkatan pelayanan BKPMPT Kab. Banjar dengan memberikan berbagai inovasi terbaru dalam pelayanan salah satunya SMS Gateway yang memudahkan Pemohon untuk mengetahui keadaan berkas izin yang didaftarkan secara auto reply disetiap tahapan proses izin. Selain itu penyediaan sistem informasi pendukung pelayanan yang berbasis Teknik Informasi baik berupa aplikasi maupun website, dengan adanya website dan aplikasi perizinan ini dapat mempermudah dalam pemrosesan perizinan.

6. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

a. Kegiatan Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

BKPMPT Kab. Banjar mengadakan pameran tingkat kabupaten dan nasional yang bertujuan untuk mengenalkan segala bentuk perizinan kepada masyarakat, selain itu pembuatan dokumen dan laporan optimalisasi pemanfaatan informasi dan teknologi dalam bidang perizinan dalam bentuk Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) berupa kuesioner yang diberikan dengan mengacu dari beberapa unsur pelayanan yang langsung diisi oleh para masyarakat. Berikut unsur pelayanan secara global :

- Kemudahan persyaratan pelayanan
- Kemudahan prosedur pelayanan
- Kecepatan waktu pelayanan
- Kejelasan, kewajaran dan kesesuaian biaya yang dibayarkan dengan yang ditetapkan
- Kesesuaian produk spesifikasi jenis pelayanan dengan ketentuan yang telah ditetapkan
- Kompetensi petugas pelayanan
- Perilaku petugas pelayanan
- Kesesuaian maklumat pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan publik
- Kesesuaian dan kemampuan dalam penanganan pengaduan, saran dan masukan

B. Rencana Kinerja Tahun 2016

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2011 – 2016, disusunlah suatu Rencana Kinerja (Performance Plan) setiap tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus dicapai dalam satu tahun pelaksanaan.

Target kinerja ini menunjukkan nilai kualitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Rencana Kinerja Tahun 2016 ini merupakan komitmen seluruh anggota organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dan sebagai bagian dari upaya

memenuhi misi organisasi. Dengan demikian seluruh proses perencanaan dan pengendalian aktivitas operasional lingkup Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Kabupaten Banjar sepenuhnya dapat dirujuk pada Rencana Kinerja Tahun 2016 ini.

Sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dapat disajikan pada tabel berikut :

RENCANA KINERJA TAHUNAN

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU TAHUN 2016

Sasaran Strategis						No.	Program/ Kegiatan	Output Kegiatan			Outcome Program		
Uraian		Indikator kinerja		Satuan	Target			Indikator kinerja	satuan	Target	Indikator kinerja	satuan	Target
1	1	2	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
01	Terbentuknya kompetensi Sumber Daya Manusia BKPMPT melalui pendidikan dan pembelajaran berkelanjutan	01	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat	Org	10	01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		02	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bintek	org	40		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah Peserta Diklat	Org	0	meningkatnya kemampuan aparatur	Org	0
							Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah peserta bintek	Org	25	meningkatnya kemampuan aparatur	Org	25
02	Terlaksananya sistem reward atas kinerja SDM pada BKPMPT	03	Insentif Khusus Tim perizinan dan Pelaksana Kegiatan	Bln	12	03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
							Penyedia pendukung administrasi/teknis perkantoran	Reward/Honor Tim Perizinan dan Panitia Pelaksana Kegiatan	Bln	12	Lancarnya kegiatan administrasi kantor	bulan	12
03	Terbentuknya akuntabilitas pengelolaan keuangan BKPMPT	05	Jumlah laporan realisasi kinerja	Laporan	3	04	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		06	Jumlah laporan keuangan semesteran	laporan	2		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan realisasi kinerja	Laporan	3	Laporan Realisasi Kinerja tepat waktu dan akuntabel	laporan	3
		07	Jumlah laporan keuangan akhir tahun	laporan	1		Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah laporan Keuangan Semesteran	Laporan	2	laporan Keuangan semesteran tepat waktu dan akuntabel	laporan	2
							Penyusunan Laporan Keuangan akhir tahun	Jumlah laporan akhir tahun	laporan	1	Laporan akhir tahun tepat waktu dan akuntabel	laporan	1
04	Tersedianya layanan administrasi/ketatusahaan yang memadai	08	Tersedianya materai dan benda pos lainnya	Buah	200	03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
							Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah persediaan materai dan benda pos lainnya	buah	0	Lancarnya kegiatan administrasi kantor	Tahun	0

Sasaran Strategis						No.	Program/ Kegiatan	Output Kegiatan			Outcome Program		
Uraian		Indikator kinerja		Satuan	Target			Indikator kinerja	satuan	Target	Indikator kinerja	satuan	Target
1	1	2	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		09	Tersedia layanan listrik, ledeng, telepon dan internet	bln	12		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Pembayaran Rekening Listrik, ledeng, telepon dan internet	bulan	12	Lancarnya kegiatan administrasi kantor	bulan	12
		10	Tersedianya layanan jasa kebersihan	bln	12		Penyediaan jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa petugas kebersihan	bulan	12	Bersihnya lingkungan kantor	bulan	12
		11	Tersedianya alat tulis kantor	thn	1		Penyediaan alat tulis kantor	tersedianya alat tulis kantor	bulan	12	lancarnya kegiatan administrasi kantor	bulan	12
		12	Tersedianya barang cetakan dan layanan penggandaan	thn	1		Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	tersedianya barang cetakan dan layanan penggandaan	Tahun	1	lancarnya kegiatan administrasi kantor	Tahun	1
		13	Tersedianya komponen listrik/penerangan kantor	thn	1		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Tahun	1	lancarnya kegiatan administrasi kantor	Tahun	1
		14	Prosentase realisasi paket penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	%	100		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	paket	4	lancarnya kegiatan administrasi kantor	Tahun	1
		15	Tersedianya makanan dan minuman pegawai rapat dan tamu	thn	1		Penyediaan makanan dan minuman	Penyediaan makanan dan minuman pegawai, rapat, dan tamu	Tahun	1	Terpenuhinya kebutuhan makan dan minum	Tahun	1
		16	Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas	thn	1		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas	Tahun	1	lancarnya kegiatan administrasi kantor	Tahun	1
05	Tersedianya sarana prasarana yang memadai dan siap pakai	17	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	unit	1	05	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		18	Prosentasi realisasi paket pengadaan peralatan gedung kantor	%	100		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah pengadaan Perlengkapan Gedung kantor	Paket	3	Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor	%	100
		19	Prosentase realisasi paket pengadaan meubelair	%	100		Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah pengadaan peralatan gedung	Paket	16	Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor	%	100

Sasaran Strategis						No.	Program/ Kegiatan	Output Kegiatan			Outcome Program		
Uraian		Indikator kinerja		Satuan	Target			Indikator kinerja	satuan	Target	Indikator kinerja	satuan	Target
1	1	2	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
								kantor					
		20	Prosentase realisasi paket pemeliharaan gedung kantor	%	100		Pengadaan Meubelair	Jumlah pengadaan meubelair kantor	paket	0	Terpenuhinya kebutuhan meubelair kantor	%	0
		21	Prosentase jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	%	100		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung Tempat Kerja	Jumlah paket/kegiatan pemeliharaan gedung	paket	7	Gedung kantor terawat dengan baik	%	100
			Prosentase jumlah kendaraan dinas/operasional dalam kondisi baik dan siap pakai	%	100		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	Unit	2	Kendaraan dinas terawat dengan baik	%	100
							Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah paket pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	paket	3	Perlengkapan gedung kantor dapat dipergunakan optimal	%	100
							Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah paket pemeliharaan peralatan gedung kantor	paket	1	Peralatan gedung kantor dapat dipergunakan optimal	%	100
06	Terlaksananya sistem dan prosedur pelayanan Perizinan sesuai dengan peraturan dan Standar Pelayanan Perizinan yang baku dan dinamis	22	Jumlah Buku Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Perundangan	buku	2	03	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
					X		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah buku SPP dan Peraturan Perundangan	Buku	0	Terpenuhinya kebutuhan buku SPP dan Peraturan perundangan	%	0
07	Terlaksananya sistem dan prosedur kegiatan kantor sesuai Standar Mutu ISO 9001:2008	23	Penambahan standar pelayanan Perizinan yang sesuai Standar Mutu ISO 9001:2008	Keg	0	06	Program Penunjang Pemerintahan dan Pembangunan
		24	Audit penyelenggaraan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008	Kali	1		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Jasa Kegiatan Kantor	Update dan Audit SOP 9001:2008 pelayanan perizinan	keg	1	Update dan terauditnya SOP pelayanan perizinan sesuai standar ISO 9001:2008	keg	1
08	Terselenggaranya pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan BKPMPT	25	Terselenggaranya penilaian IKM	bln	12	06	Program Penunjang Pemerintahan dan Pembangunan
		26	Nilai perolehan IKM (nilai indeks IKM)	indeks IKM	81		Penunjang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Jasa Kegiatan Kantor	Kegiatan penilaian IKM	Bulan	12	Diperolehnya nilai indeks IKM	indeks IKM	80
09	Tersedianya sistem informasi dan manajemen pelayanan berbasis TI	27	Jumlah penambahan / upgrade SIM pelayanan	buah	2	07	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sasaran Strategis						No.	Program/ Kegiatan	Output Kegiatan			Outcome Program		
Uraian		Indikator kinerja		Satuan	Target			Indikator kinerja	satuan	Target	Indikator kinerja	satuan	Target
1	1	2	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
		28	Prosentasi ketepatan waktu penyelesaian ijin	%	83		Penyusunan sistem Informasi terhadap layanan Publik	Kegiatan penambahan / upgrade Software dan Hardware Pelayanan	Paket	2	Terpenuhinya kebutuhan Software dan Hardware berbasis TI	%	100
10	Tersedianya mekanisme dan sarana penyampaian aspirasi dan penanganan pengaduan masyarakat	29	Terbentuk dan beroperasionalnya unit penanganan pengaduan masyarakat	unit	1	08	Program Mengintensifkan Pengaduan Masyarakat
		30	Jumlah penanganan pengaduan masyarakat	%	100		Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	Terbentuknya Unit Penanganan Pengaduan	Unit	1	Pengaduan masyarakat tertangani sesuai mekanisme	%	100
11	Terciptanya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap proses Perizinan dan pentingnya Perizinan bagi iklim usaha yang sehat	31	Jumlah Kecamatan lokasi sosialisasi	Kec	0	06	Program Penunjang Pemerintahan dan Pembangunan
		32	Jumlah peserta sosialisasi	org	0		Sosialisasi Perundang-Undangan	Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi	Keg	1	Diterimanya materi sosialisasi oleh masyarakat sosialisasi	%	100
12	Terpenuhinya target penerimaan PAD	33	Prosentasi penerimaan PAD	%	100	09	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		34	Jumlah penerbitan SK Ijin	Ijin	3050		Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah	Terselenggaranya kegiatan intensifikasi penerimaan PAD	Keg	1	Realisasi penerimaan PAD	%	100
						10	Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi	-	-	-	-	-	-
							Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terlaksananya realisasi kebijakan penanaman modal	persen	100	Terealisasinya pengawasan pelaksanaan penanaman modal	%	100
							Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi						
						11	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	-	-	-	-	-
							Memfasilitasi dan Koordnasi Kerjasama di Bidang Investasi	Terseainya Informasi data BUMD dan data-potensi investasi Kabupaten Banjar	persen	100	Meningkatkan pembinaan dan pengendalian perekonomian daerah	%	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Di dalam melakukan pengukuran kinerja, terdapat beberapa tahapan, tahapan yang pertama adalah penetapan kinerja, pengumpulan data kinerja, dan cara pengukuran kinerja. Untuk penetapan kinerja telah dimuat dalam Bab II mengenai Rencana Kinerja Tahun 2016.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menggunakan indikator kinerja. Pengukuran dilakukan dengan memanfaatkan sumber data kinerja yang diperoleh dari data internal instansi dan data eksternal yang berasal dari luar instansi baik berupa data primer maupun sekunder.

Pengukuran kinerja mencakup kinerja kegiatan yang merupakan tingkat capaian target dari masing-masing indikator (masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak), dan kinerja sasaran yakni tingkat pencapaian sasaran dengan indikator yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja.

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Evaluasi kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKPMPT Kabupaten Banjar.

Laporan Akuntabilitas Kinerja BKPMPT Kabupaten Banjar yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala LAN Nomor 239/X/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum Badan Koordinasi Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar telah dapat melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari indikator kinerja sasaran secara keseluruhan adapat tercapai sesuai harapan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja yang dilaksanakan dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja

No	Indikator Utama	Capaian 2015	2016			Target Akhir Renstra(2020)	Capaian s/d 2016 terhadap 2020 (%)
			Target	Realisasi	%realisasi		
1	persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)		82,5	119,9	145,3	88,5	135,48
2	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg telah ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100
3	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan	81,28	81,5	83,99	103,33	82,2	102,17

Dari tabel 3.1 dapat diketahui bahwa persentase capaian (indikator sasaran RPJMD/indikator kinerja utama) yaitu persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA) hingga saat ini terealisasi sebesar Rp. 1.547.450.102.887 atau 119,9 % melebihi target yang ditetapkan yaitu 82,5% Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 nilai Realisasi Investasinya sebesar Rp. 703.741.249.275 hal ini disebabkan karena banyak sosialisasi yang dilakukan BKPM PPT Kab Banjar terhadap para investor sehingga meningkatkan kesadaran investor/masyarakat tentang pentingnya berinvestasi di Kabupaten Banjar, selain itu semakin meningkatnya koordinasi antar SKPD terkait guna memudahkan dan melancarkan dalam pemrosesan perizinan. Sumber Daya Manusia yang semakin berkualitas juga menjadi salah satu berhasilnya investasi di Kabupaten Banjar mengalami peningkatan yang lumayan signifikan. Selain itu masih banyak penyebab meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Banjar yaitu tingkat keamanan usaha yang cukup tinggi dan keadaan yang kondusif juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah investasi, banyaknya kemudahan yang diberikan BKPM PPT Kab. Banjar kepada para investor guna mempermudah pelayanan perizinan, kepastian hukum, regulasi yang jelas dan sumber daya alam yang melimpah dan yang

masih tersedia terutama dibidang Kelapa Sawit dan karet bahkan di bidang perdagangan dan perumahan juga menjadi daya tarik bagi investor.

Dalam rangka mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat maka di bentuklah Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada BKPMPT Kabupaten Banjar, Unit ini bertugas mulai dari penerimaan pengaduan sampai pada memfasilitasi penanganan/pemecahan permasalahan yang di hadapi dengan target adanya respon terhadap pengaduan tersebut maksimal 10 hari kerja.

Di dalam Kegiatan pengaduan masyarakat, disini di buat tim khusus sehingga kalau ada pengaduan dari masyarakat dapat segera di atasi. Dan Kegiatan ini menunjukkan bahwa target RPJM pada IKU telah tercapai.

Dapat dilihat dari tabel berikut ini, IKU dan target RPJM dengan perbandingan tahun 2011 – 2016 sbb :

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pengaduan masyarakat tentang layanan public bidang perizinan yang telah ditindaklanjuti	4	7	8	8	8	0
Penyelesaian pengaduan masyarakat	3	3	4	6	8	0
PERSENTASE	75%	42%	50%	100%	100%	100%

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa target pengaduan dari masyarakat tidak ada pengaduan untuk tahun 2016 ini. Tidak ada pengaduan berarti tidak ada masalah di dalam pelayanan perizinan yang mana di bandingkan dengan tahun 2015 masih ada pengaduan tetapi dalam pengaduan tersebut dapat di selesaikan dengan baik.

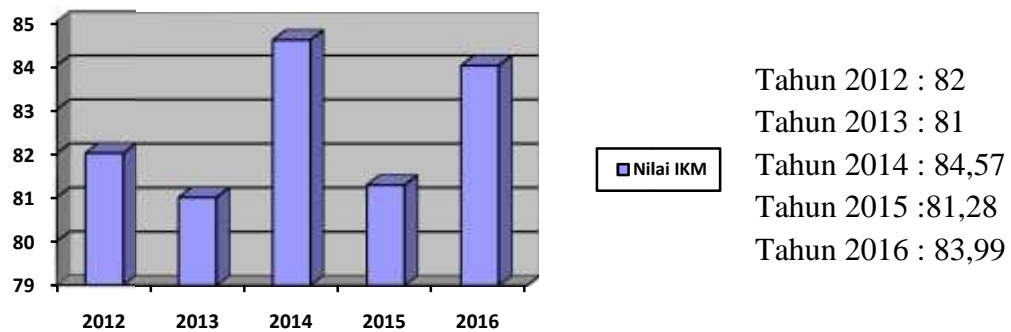
Untuk Tahun 2016 di dalam kegiatan ini masih di lakukan monitoring kelapangan walaupun tidak ada pengaduan, yang mana BKPMPT kabupaten Banjar tetap selalu memantau baik dari segi masyarakatnya maupun pembangunannya. Peningkatan Kualitas SDM dalam penanganan Pengaduan dan Pelayanan Perizinan menjadi salah satu penyebab tidak adanya pengaduan yang masuk untuk tahun 2016 ini.

Kegiatan IKM dapat dilaksanakan sesuai target yaitu 1 tahun dengan menggunakan Aplikasi Penilaian IKM yang dibuat staf BKPMPT Banjar, Nilai IKM yang di diperoleh BKPMPT Banjar Tahun 2015 ini adalah 81,28 atau dalam kategori Baik Sekali dan tahun 2016 IKM BKMPPT adalah 83,99 jika di

bandingkan dengan tahun lalu ada peningkatan dalam nilai kualitatif kepuasan sangat baik dengan nilai katagori mutu pelayanan A.

Harapan kedepannya adalah dimungkinkannya penganggaran untuk uang lelah petugas IKM yang bekerja melakukan wawancara, pengumpulan data, pengolahan data, sampai pada pembuatan laporan, dengan harapan dapat meningkatkan kinerja mereka, yang ada gilirannya dapat menghasilkan data IKM yang lebi baik lagi. Rekapitulasi hasil penilaian IKM dapat dilihat pada lampiran.

Nilai di atas jika dikonversikan dengan rumus yang di tetapkan menjadi 81,28 / A / sangat baik.



Grafik di atas adalah nilai IKM selama 5 tahun terakhir

IKM ini salah satu kegiatan yang termasuk di dalam target RPJM, yang mana setiap tahunnya IKM meningkat nilainya, untuk tahun ini nilainya meningkat di sebabkan beberapa faktor diantaranya :

1. Terjadinya perubahan peraturan dari MANPAN Nomor 16 tahun 2014 tentang pedoma SKM yang mana dari IKM menjadi SKM.
2. Selain itu juga perubahan unsur penilaian pelayanan yang dulu ada 14 unsur menjadi 9 unsur.
3. Jumlah responden yang ditentukan oleh provensi sebanyak minimal 150 responden sedangkan dalam rumus yang digunakan seharusnya minimal 100 responden, meski demikian tetap mengikuti acuan provensi Kal-Sel.
4. Nilai indek IKM tahun 2016 tidak mengurangi nilai kepuasan masyarakat untuk IKM yang mana masih katagori Sangat Baik.

Selain itu juga melalui Aplikasi SIM Kearsipan Elektronik, manajemen kearsipan pada BKPMPT Banjar lebih mudah dilakukan, mulai dari penyimpanan, peminjaman, penemuan kembali sampai pada sorting retensi arsip dilakukan dengan manajemen database Aplikasi SIM Kearsipan Elektronik dan ini sangat membantu sekali di dalam pencarian arsip kalau ada perusahaan atau orang yang ingin menghidupkan kembali izin yang sudah tidak aktif lagi

sedangkan berkas tersebut tidak memiliki / hilang dengan kearsipan ini sangat membantu dalam penemuan berkas.



Salah Satu contoh kearsipan yang ada di BKPMPT yang dapat akses melalui aplikasi SIM kearsipan

Untuk Realisasi atau capaian keuangan program dan kegiatan yang mengacu pada RPJMD Kab. Banjar dapat dilihat di tabel berikut :

Tabel Realisasi Keuangan yang mengacu pada RPJMD

No	Indikator Utama	Capaian 2015 (%)	2016			Target Akhir Renstra(2020)	Capaian s/d 2016 terhadap 2020 (%)
			Target (DPA)	Realisasi	%realisasi		
	persentasi pertumbuhan investasi(kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA)	97,93	1.457.132.520	1.435.672.438	98,52	5.389.533.370	26,63
1.	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	98,71	871.432.520	856.360.398	98,27	3.009.560.450	28,45
2	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invetasi	99,49	419.620.000	414.527.790	98,79	1.666.600.260	24,87
3	Program Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah	95,61	166.080.000	164.784.250	99,22	544.372.660	30,27
	Persentase penanganan pengaduan tentang layanan publik dibidang perizinan yg	99,14	94.360.000	76.665.000	81,25	263.771.820	29,06

telah ditindaklanjuti							
1	Program Mengintensifikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	99,14	94.360.000	76.665.000	81,25	263.771.820	29,06
Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan perizinan		89,44	380.715.120	355.090.829	93,26	2.681.209.660	13,24
1	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	87,36	208.115.120	196.097.080	94,23	1.892.047.260	10,36
2	Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan	91,53	172.600.000	158.933.749	92,12	789.162.400	20,14

Dari tabel di atas diketahui bahwa serapan anggaran untuk indikator utama yaitu persentasi pertumbuhan investasi (kenaikan/penurunan nilai realisasi PMDN / PMA) adalah sebesar 98,52 atau sebesar Rp. 1.435.672.438,- dari anggaran sebesar Rp.1.457.132.520,-. Ini menunjukkan adanya penyerapan anggaran yang kurang sebesar 1,48%. Sedangkan bila dibandingkan dengan tahun 2015 maka serapan anggaran tahun 2016 lebih tinggi daripada serapan anggaran tahun 2015 yaitu sebesar 97,93%. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian 2016 masih lebih tinggi sebesar 28,63%.

Untuk Program yang dilaksanakan ada 6 (enam) kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Capaian tahun 2016 sebesar 98,27% atau kurang 1,73% dari target 100% yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka capaian tahun 2016 masih lebih kecil sebesar 0,44%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian 2016 masih lebih tinggi sebesar 28,45%.
2. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Capaian tahun 2016 sebesar 98,79% atau kurang 1,21% dari target 100% yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka capaian tahun 2016 masih lebih kecil sebesar 0,7%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian 2016 masih lebih tinggi sebesar 24,87%
3. Program Peningkatan dan pengembangan keuangan daerah
Capaian tahun 2016 sebesar 99,22% atau kurang 0,78% dari target 100% yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka capaian tahun 2016 masih lebih besar sebesar 3,61%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian 2016 masih lebih tinggi sebesar 30,27%

4. Program Mengintesisifikasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat

Capaian tahun 2016 sebesar 81,25% atau kurang 18,75% dari target 100% yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka capaian tahun 2016 masih lebih kecil sebesar 17,89%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian 2016 masih lebih tinggi sebesar 29,06%

5. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Capaian tahun 2016 sebesar 94,23% atau kurang 5,77% dari target 100% yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka capaian tahun 2016 masih lebih besar sebesar 6,87%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian 2016 masih lebih tinggi sebesar 10,36%

6. Program Penunjang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan

Capaian tahun 2016 sebesar 92,12% atau kurang 7,88% dari target 100% yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 maka capaian tahun 2016 masih lebih besar sebesar 0,59%, jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian 2016 masih lebih tinggi sebesar 20,14%.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang terkait dengan akuntabilitas kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan dari rencana kegiatan Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu yang disusun pada Tahun Anggaran 2016 ini telah mengakomodasi penerapan anggaran berbasis kinerja dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Banjar telah menjalankan 10 program dan 34 kegiatan yang mana 6 program merupakan program utama pada RPJMD yaitu program, sedangkan 4 program lainnya merupakan program pendukung.
3. Sementara itu untuk pencapaian target Penerimaan Daerah sebesar :

No	Uraian	Target	realisasi	Persen-tase
1.	Pendapatan Pajak Daerah	Rp 900.000.000	Rp 873.005.472	97,00 %
2	Hasil Retribusi Daerah	Rp 200.000.000	Rp 170.429.300	85,21 %
	Jumlah	Rp. 1.100.000.000	1.068.104.716	97,10 %

4. Berkaitan erat dengan hasil capaian atau realisasi yang telah diperoleh menunjukkan terjadinya perbaikan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk mampu bekerja secara profesional dengan terus mengupayakan peningkatan, kemampuan sumber daya manusia, sistem atau mekanisme perencanaan sesuai dengan tuntutan perkembangan. Hal terpenting juga yang sangat menunjang adalah penyediaan fasilitas penunjang sesuai dengan perkembangan teknologi.
5. Penjabaran hasil kinerja ini menjadi bahan untuk peningkatan capaian dalam masa kedepan, dan menjadi acuan terutama bagi staf internal Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu untuk lebih memberi arah

pada sasaran-sasaran yang diharapkan untuk tahapan pembangunan selanjutnya.

B. Saran-Saran

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi acuan peningkatan kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu Kabupaten Banjar kedepannya sehingga dapat lebih terarah berdasarkan program dan kegiatan yang ditetapkan dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Banjar dalam hal peningkatan pendapatan daerah dan Peningkatan Pelayanan yang proporsional dan akuntabel berpedoman pada misi ke 3 dan 5.

Penjabaran hasil kinerja ini menjadi bahan untuk peningkatan capaian dalam masa kedepan, dan menjadi acuan terutama bagi staf internal Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk lebih memberi arah pada sasaran-sasaran yang diharapkan untuk tahapan pembangunan selanjutnya. Penyajian LKJIP diharapkan lebih berbobot lagi dan dapat diakses secara internal antar SKPD sehingga menjadi satu kesatuan utuh kinerja Pemerintah Kabupaten Banjar.

Martapura, Februari 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banjar

Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM
NIP. 19660318 198602 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, maka penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2016 BKPMPT dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Laporan Kinerja Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar ini adalah merupakan dokumen pertanggung jawaban Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar dalam menjalankan kegiatan-kegiatan pokoknya sesuai dengan Visi Misi yang telah dirumuskan, mengacu pada tugas pokok yang dibebankan.

Sebagai salah unsur dari fungsi pembangunan, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat berperan dalam meningkatkan kinerja atau keberhasilan penyelenggaraan pembangunan secara keseluruhan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja ini diharapkan pula dapat menjadi bahan atau acuan bagi segenap unsur Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banjar sendiri untuk lebih meningkatkan peran aktif dalam mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Selanjutnya Laporan ini juga menjadi masukan penilaian bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar.

Martapura, Januari 2017
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Perizinan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Banjar

Drs. AKHMAD HAIRUDDIN FAHRI, MM
NIP. 19660318 198602 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	27
BAB IV PENUTUP	34
A. Kesimpulan.....	34
B. Saran-saran.....	35